

BAB II

MILITAN KURDI DALAM KONFLIK DAN SIKAP TURKI

A. Gerakan Politik Kurdistan Dan Penyebaran Pengaruh PKK di Timur Tengah

1. Sejarah dan Profil Etnis Kurdistan Hingga Gerakan Politik PKK di Turki.

Kurdi merupakan etnis terbesar ke-empat di Timur-Tengah dengan populasi sekitar 22 juta jiwa menyebar di seluruh dunia, termasuk kelompok etnis kurdi menempati wilayah yang mereka klaim sebagai “Kurdistan atau Kurdistans Raya” dengan mencakup wilayah pegunungan yang berada di sekitar Turki, Irak, Suriah, Iran dan sebagian berada di Armenia, dan komunitas Kurdi juga bisa ditemui di wilayah di Lebanon, Azerbaijan (Kalbajar dan Lachin, sebelah barat Nagorno Karabakh) dan pada beberapa dasawarsa terakhir, berada di negara-negara Eropa serta Amerika Serikat. Namun secara etnis, kelompok ini memiliki ikatan erat dengan suku bangsa Iran.

Secara karakter geografis, Kurdistan terdiri dari gugusan perbukitan, struktur sosial yang sangat erat dengan sentiment tribalisme, serta sistem mata pencaharian yang mengandalkan pertanian dan mengembala. Hal ini memang membuat bangsa dan wilayah Kurdistan menjadi semi-eksklusif sepanjang sejarahnya selama sekitar 3.000 tahun. Sepanjang sejarahnya, memang tidak ada

satu bangsa atau kekuatan pun yang mampu menguasai secara penuh bangsa dan wilayah Kurdi atau Kurdistan. Yunani, Romawi, Persia, dan bahkan Dinasti berbasis Islam selalu gagal menundukkan secara penuh bangsa Kurdi. Bahkan dalam sistem modern sekarang ini, Turki, Iran, Irak dan Suriah juga mengalami kegagalan untuk menguasai secara penuh wilayah Kurdi.



Gambar 2.1.1 Peta Kurdistan Raya di di Timur Tengah. sumber :
(Ekurd.net)

Berdasarkan catatan sejarah, nenek moyang suku Kurdi memasuki wilayah yang mereka tempati sekarang sekitar 3.000 tahun lalu, tapi cara hidup suku ini sebagai petani dan pengembala, sangat tradisional. Sementara banyak ilmuwan berpendapat bahwa suku Kurdi menguasai daerah Pegunungan Parsi dan dari tahun 614-550 SM. Kemudian empat belas abad kemudian mereka memeluk

agama Islam, setelah kedatangan pasukan Arab Islam dari daratan ke daerah Pegunungan Parsi (Sahide, 2013)

Secara geopolitik, Kurdistan terbagi atas empat wilayah yaitu: Kurdistan Bakur atau Kurdistan Utara yang berada di Turki, Kurdistan Rojava atau Kurdistan Barat yang berada di Suriah, Kurdistan Rohilat atau Kurdistan Timur yang berada di Iran dan Kurdistan Basur atau Kurdistan Selatan yang berada di Irak. Suku Kurdi adalah suatu kelompok etnis Indo-Eropa (*Indo European tribes*) yang mayoritas menganut agama Islam Sunni. Dan kalau berdasarkan kesukuan, mereka berasal dari bangsa Medes yang masuk ke Parsi dari tahun 614-550 sebelum Masehi.

Menurut M. Riza Sihbudi, Suku Kurdi juga memiliki Bahasa sendiri yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari yakni Kurmanji dan Sorani/Kurdi. Mereka merupakan etnis yang cukup tua, tetapi kesadaran terhadap wilayah sebagai tempat mereka tinggal baru muncul belakangan ini dan hitungan terlambat. Penyebabnya adalah kultur tradisional nomaden, yang hidupnya berpindah-pindah sambil ternak dan Bertani. Sehingga pasca Perang Dunia I, ketika Negara-negara mulai menetapkan garis perbatasan, barulah kesadaran bersatu dalam satu wilayah suku Kurdi muncul, terutama karena terdesak dan terpaksa meninggalkan pola hidup tradisionalnya, serta mulai hidup menetap (Sihbudi, 1991).

Diketahui, masing-masing wilayah Kurdistan memiliki gerakan politik yang berbeda-beda, namun secara praktikal pergerakan politik disatu wilayah Kurdistan, cepat menyebar ke wilayah Kurdistan yang lain. Maka, bangsa kurdi

sejak awal abad ke-20 yang lalu telah mencoba mewacanakan kemerdekaan Kurdistan, lebih tepatnya setelah perang dunia pertama berakhir. Kesultanan Utsmaniyah yang kalah perang, didesak atas perjanjian Sykes Picot dan Sevres oleh sekutu (Inggris dan Perancis) yang menginginkan wilayah mandat koloni dan membuat wilayah kesultanan menjadi mengecil. Selain pengakuisisian wilayah koloni, dua perjanjian tersebut juga memberi kesempatan kelompok bangsa minoritas sebuah wilayah dan negara yang berdaulat, sebut saja Armenia. Walaupun dalam dalam Perjanjian Sevres bangsa Kurdi memiliki ruang lobi yang cukup lebar, bahkan telah mempersiapkan konsep wilayah yang bernama “Kurdistan”. Namun upaya tersebut gagal, karena pada kenyataannya justru pada tahun 1923 Turki mengalami revolusi demostik yang membuat Kesultanan Utsmaniyah hancur dan digantikan oleh Turki modern (Danforth, 2015).

Turki yang baru memerdekakan diri menjadi negara bangsa membuat petak wilayah menjadi paten dengan mengikatnya sebuah perjanjian Lausanne baru antara Turki dan Sekutu (Treaty of Lausanne, Allies-Turkey 1923.), yang akhirnya membuat bangsa kurdi tidak memiliki kesempatan merdeka, tak seperti Armenia yang secara gesit memproklamasikan kemerdekaan saat perjanjian Sevres di tandatangani atau sebelum teradi gejolak revolusi nasionalisme Turki baru. Akhirnya Kurdistan hanya menjadi wacana, bahkan hingga Perancis dan Inggris melepas jajahanya di Irak dan Suriah,. Setidaknya Kurdistan atau wilayah yang dihuni bangsa kurdi saat ini terpotong menjadi 5 wilayah, yaitu: Turki, Suriah, Irak, Iran, dan sedikit wilayah di Armenia. .

Irak dan Turki merupakan wilayah Kurdistan yang paling bergejolak ketimbang wilayah lain. Dalam sejarahnya, Kurdistan Irak merupakan wilayah kurdistan yang paling beruntung. Sejak tahun 1970, Kurdistan Irak telah memiliki wilayah otonomi pemerintahan sendiri yang biasa disebut Pemerintahan Regional Kurdistan (*Kurdistan Regional Government, KRG*) yang menjadi hasil dari usaha perlawanan senjata sejak 1961, sebagai bagian dari gerakan nasionalisme kurdi. Setidaknya organisasi yang telah menggerakkan kemerdekaan itu sebut saja Partai Demokratik Kurdistan (Kurdistan Democratic Party, KDP) yang telah berjasa mempopulerkan gerakan nasionalisme kurdistan sejak tahun 1946. (Kirmanj, 2013, hal. 146-147)

Wilayah Kurdistan paling banyak. di Turki, diskriminasi etnis dan penghilangan identitas kurdi berada di era republik yang secara politik dihegemoni oleh kekuatan militer. Pengakuan etnis Kurdi yang bukan bagian dari bangsa Turki baru ada pada tahun 1965 oleh partai sayap kiri Turki Baru (*Yeni Turkiye Partisi*). Partai Turki baru bukanlah partai politik orang kurdi, namun para pejabat partai banyak diisi oleh tuan tanah orang kurdi dan partai ini merupakan partai pertama dalam sejarah perpolitikan Turki yang mengakui bangsa kurdi sebagai bagian dari Turki sebagai respon atas sentralisasi rasial di Turki yang dilakukan pemerintahan militer pada tahun 1960an (Walter, 2015, hal. 55). Salah satunya adalah penggunaan istilah “Kurdi” ataupun “Kurdistan”. Hingga pada tahun 1990an tokoh kurdi yang berada di kursi pemerintahan tidak mewakili ke-etnisan secara personal sebagai orang Kurdi melainkan sebagai “Turkish” atau “Turk”.

Permintaan diakuinya etnis kurdi sebagai etnis terpisah dan otonomi bagi etnis kurdi di Turki tidak berhenti dan terus bertambah satu dekade setelahnya dan didukung oleh partai-partai berideologi kiri, salah satunya partai Buruh Rakyat (*Halkin Emek Partisi* atau HEP) yang berdiri pada tahun 1965, secara terang-terangan partai BR mendukung etnis Kurdi mendapatkan pengakuan ataupun memperjuangkan isu-isu Kurdistan secara kebudayaan, linguistik, ekspresi berpendapat dan lain sebagainya. Partai buruh rakyat memiliki relasi yang kuat dengan partai Illegal seperti Partai Demokrat Kurdistan dan Partai Pekerja Kurdistan yang dibuat oleh Abdullah Ocalan. Namun kedekatannya dengan kelompok politik ilegal tersebut dan juga perjuangan atas pengakuan dan hak ke-etnisan bagi rakyat kurdi membuat partai ini di larang oleh mahkamah konstitusi pada tahun 1993 atas dasar ancaman kesatuan negara, serta membuat partai pro minoritas lainnya diawasi oleh pemerintah. (*Ibid*, Walter, 2015, hal. 56-57).

Ketidakpuasan rakyat Kurdi dengan kebijakan pemerintah tersebut melatar belakangi pembentukan Partai Pekerja Kurdistan atau PKK. PKK adalah gerakan resistensi paling dikenal dalam konflik kurdi karena mendapatkan sokongan penuh dari banyak pemimpin marga-marga etnis Kurdi. Sejauh ini, perjuangan bangsa kurdi di Turki tidak bisa dilepaskan dari gerakan kaum kiri Turki, begitupun dengan PKK yang mengadopsi ideologi Marxisme-Leninisme dan strategi gerilya ala Maoist yang digunakan oleh Abdullah Ocalan sebagai pendirinya, bahkan kharisma kepemimpinan Abdullah Ocalan justru terlihat sebagai pejuang sosialis dan memomorduakan nasionalisme Kurdistan (Radu, 2001, hal. 48).

PKK selama ini dianggap sebagai organisasi teroris oleh Turki, karena PKK banyak melakukan aktifitas kriminal dan perlawanan terhadap pemerintah Turki dari tahun 1984 (Roth & Sever, 2007, hal. 905). Aktifitas kriminal yang dilakukannya adalah perdagangan narkoba dan perdagangan manusia yang membuat Turki menjadi jalur perdagangan narkoba di Eropa dari Pakistan dan Afganistan dan jalur perdagangan manusia dari Irak dan negara timur tengah lainnya. PKK juga banyak melakukan kejahatan pencucian uang di Eropa serta pemerasan terhadap warga Turki di wilayah timur. Kejahatan yang dilakukan oleh PKK juga membuat statusnya menjadi organisasi kejahatan Transnasional oleh Interpol, karena semua sindikat kejahatan tersebut memiliki relasi yang kuat dengan para pemimpin PKK dan digunakan sebagai sumber pendanaan yang diperkirakan tiap tahunnya PKK menerima pemasukan sekitar 200-500 juta dollar AS pertahun dipertengahan tahun 1990an (*Opcit*, Radu, 2001, hal. 55).

PKK juga melakukan aksi teror kepada pemerintah Turki dengan melakukan penculikan, bom bunuh diri dan bom mobil, ataupun melakukan pembunuhan yang ditargetkan kepada masyarakat sipil etnis Kurdi yang dianggap pro terhadap pemerintah bahkan rakyat sipil yang tidak sepemahaman atau mendukung Abdullah Ocalan yang berada di Turki maupun diluar negeri (*Ibid*, Radu, 2001, hal. 51). PKK membuat distabilisasi keamanan yang terjadi di daerah timur bahkan dalam konflik justru lebih banyak korban yang berjatuh dipihak etnis Kurdi ketimbang Turki dan membuat banyak etnis kurdi berdiaspora selain karena alasan menarik dukungan di luar negeri.

Pendanaan PKK tidak hanya bersumber dari jual beli barang haram dan kegiatan kejahatan, ada beberapa kelompok skala negara lain yang memberikan pendanaan, bantuan logistik dan perlindungan untuk PKK, terutama negara yang berhaluan kiri dan negara tetangga yang pernah memiliki masalah dengan Turki. Beberapa negara itu diantaranya adalah Uni Soviet, Yunani, Siprus, Armenia, Libya, Lebanon Iran, Bulgaria, Kuba dan Iraq (*Opcit*, Roth & Sever, 2007, hal. 906).

2. Perubahan Strategi Politik PKK di Turki dan Penyebaran Pengaruh PKK di Timur Tengah

PKK telah banyak melakukan kegiatan teror yang membuat statusnya menjadi organisasi teroris oleh beberapa negara dan pemberontakan gerilya tekuat di dunia menurut jurnalis Franz Schurmann dalam (*Opcit*, Radu, 2001, hal. 47). PKK selama ini menggunakan jalan kekerasan dan militer dalam mencita-citakan sebuah revolusi bagi masyarakat Kurdi. Ini yang membuat nama Abdullah Ocalan menjadi sangat tenar bahkan memiliki gelar sendiri sebagai “Apo” dan memiliki julukan “Saladin Masa Kini”. Namun pada akhir tahun 1998 PKK mengalami sebuah strukturisasi ulang dan mencoba melakukan gejatan senjata dengan pemerintah Turki dengan tujuan damai.

Perubahan PKK digagas oleh Ocalan dengan tujuan menghentikan kekerasan jalur militer dan mengganti kearah yang lebih politis pada permasalahan Kurdi, terlebih pada tahun 1999 Turki berhasil menangkap Abdullah Ocalan di Kenya atas bantuan AS. Menurut Turki penangkapan

Abdullah Ocalan akan melemahkan PKK secara internal karena selama ini aktifitas PKK banyak diarahkan oleh Ocalan secara langsung, pelemahan organisasi ini juga ditunjukkan dari tentara Turki yang berhasil menemukan persembunyian PKK di pegunungan Qandil di wilayah Irak (Posch, 2015, hal. 88).

Lebih jelasnya, penangkapan Abdullah Ocalan membuat berkurangnya semangat PKK, para pemimpin yang tersisa bahkan Abdullah Ocalan sendiri telah beresepakat untuk melakukan restrukturisasi organisasi dan strategi PKK menjadi organisasi politis dengan walaupun berat karena banyak mengecewakan pendukungnya. Perubahan struktur yang dilakukan oleh PKK adalah mengubah namanya menjadi Kurdistan Merdeka dan Kongres Demokrasi atau KADEK (*Kongreya Azidya Demokratika Kurdistan*) pada tahun 2000 dan berubah lagi menjadi Federasi Masyarakat Kurdistan atau KKK (*Koma Komalen Kurdistan*) pada tahun 2004 atas perintah Abdullah Ocalan di penjara dan berubah lagi menjadi Komunitas Uni Kurdistan atau KCK (*Koma Civaken Kurdistan*) beberapa bulan setelahnya (*Ibid*, Posch, 2015, hal. 89). Perubahan nama digunakan untuk menghilangkan kesan PKK selama ini sebagai organisasi pemberontakan sekaligus mewakili posisi *Pan-Kurdish* untuk masyarakat Kurdi lebih jauh di Kurdistan karena pembentukan KCK juga berdasarkan kesepakatan masyarakat kurdi secara bersama dan diatur dalam sebuah kontrak sosial melalui Kongres Nasional Kurdistan (*Kongra Netwaiya Kurdistan*, KNK).

KCK menjadi organisasi advokasi bagi masyarakat Kurdi, yang memiliki visi demokrasi konfederalisme untuk masyarakat Kurdi, menggantikan negara

bangsa sebagai sebuah resolusi konflik yang terjadi. Abdullah Ocalan menggagas KCK pada tahun 1994 dan merupakan orang terkuat dengan jabatan sebagai pimpinan kehormatan, walau dalam berada di penjara dan KCK dipimpin oleh pemimpin yang dipilih lewat pemilihan di badan eksekutif organisasi ini . Tak seperti PKK, KCK memiliki struktur sebagai afiliasi organisasi Kurdi di regional Kurdistan yang memiliki subdivisi garis depan yaitu front ideologi, politik, sosial, militer dan perempuan. Dan beranggotakan empat organisasi politik yang berdiri di wilayah Kurdistan itu sendiri, yaitu Partai Pembebasan Kurdistan (*Partiya Jiyana Azas A Kurdistane*, PJAK) di Iran, Partai Uni Demokratik (*Partiya Yekitia Demokrat*, PYD) di Suriah, Partai Solusi Demokratik Kurdistan (*Partiya, Carseravi Demokratik Kurdistan*, PCDK) di Irak, dan Tentara Perlindungan Rakyat yang merupakan sayap militer PKK (Hevian, 2013, hal. 8).

Untuk menanamkan pengaruh politik, beberapa anggota PKK juga membentuk organisasi payung diluar Kurdistan, yaitu Konfederasi Asosiasi Kurdi di Eropa (KON-KURD) yang berbasis di Brussel. Semenjak berdirinya kongres nasional Kurdistan pada tahun 1999, organisasi yang saling berafiliasi tersebut memiliki visi lebih jelas untuk mempromosikan demokrasi dan lobi-lobi perdamaian melauai politik yang berkaitan dengan permasalahan Kurdi (*Ibid*, Hevian, 2013, hal. 2).

KCK merupakan salah satu afiliasi politik kurdi yang paling berpengaruh di dunia, walaupun sebenarnya masih ada afiliasi politik lain maupun organisasi kurdi lain yang bergerak dan tidak semua organisasi tersebut memiliki hubungan yang buruk dengan pemerintah selain Turki. Seperti Irak yang memperbolehkan

PKK bergerak didalam teritorialnya saat sedang pecah perang teluk. Rezim Irak sebelum Saddam Husein telah memiliki hubungan yang baik dengan Kurdi, terlebih Kurdi diberikan hak otonomi dan diberikan pemerintahan otonomi khusus namun yang terjadi adalah konflik internal antara dua partai yaitu yaitu Partai Demokratik Kurdistan atau KDP (*Partiya Demokrat a Kurdistane*) dan Uni Patriotik Kurdistan atau PUK (*Yekêtiy Niştîmaniy Kurdistan*) yang menguasai pemerintahan otonomi Kurdistan di Irak hingga tahun 1998.

PKK yang sedang dalam transformasi, pada masa tersebut lebih banyak menyebarkan pengaruh di wilayah Kurdistan Irak (Kirmanj, 2013, hal. 147), namun disaat bersamaan PKK dihadapkan oleh KDP dan PUK yang telah berdamai dan menjadi satu disaat perang teluk melawan diktator Saddam Husein dan menjadi penguasa pemerintahan regional kurdistan (*Kurdistan Regional Government* atau KRG) pada tahun 2005. Ketakutan KDP terhadap pengaruh PKK menyebar di Irak, KRG membuat pelarangan terhadap PCDK yang merupakan anggota KCK di Irak sebagai organisasi ilegal.. Selama KCK terbentuk, KDP merupakan musuh utama dalam hal ideologi, KCK tetap mempertahankan ideologi sosialisnya sebagaimana pada masa PKK pada masa sebelum tahun 1998, sedangkan KDP mempertahankan ideologi nasionalisme Kurdistan. Baik KDP maupun PKK merupakan dua kelompok yang saling bersaing dalam dunia perpolitikan Kurdistan walaupun keduanya memiliki kesamaan tujuan untuk membentuk sebuah demokratik konfederalis bagi rakyat kurdi di Kurdistan.

Di Iran sendiri, PJAK merupakan kelompok yang dianggap separatis sebagai mana dengan Turki karena memiliki affiliasi dengan KCK yang

merupakan bentukan PKK dan membuka pertempuran di sisi timur bersama Turki. Pengaruh PKK pada Kurdsitan Iran tidak begitu luas, justru PKK lebih banyak memiliki pengaruh di Suriah. Menurut Michael Radu, Kurdi di Suriah memiliki peranan paling penting bagi PKK dan perjuangan Kurdi sejak tahun 1980an, karena Kurdi di Suriah menjadi bagian esensial bagi pusat rekrutmen PKK terlebih PYD merupakan memiliki visi ideologi yang sama. Selain itu PKK juga memiliki hubungan yang kuat dengan pemerintah Suriah, walaupun pada tahun 1998 Suriah menghentikan dukungannya pada PKK dan mengusir Abdullan Ocalan dari Suriah yang selama ini bersembunyi di Suriah (*Opcit*, Radu, 2001, hal. 53).

Perjuangan masyarakat Kurdi di masing masing daerah pada dasarnya memiliki kesamaan, yaitu menentang hegemoni budaya entah itu Arabisasi yang dilakukan oleh pemerintah Irak maupun Suriah dan Turkisasi yang dilakukan oleh Turki dan hegemoni tersebut telah menyamakan perbedaan masyarakat kurdi sebagai kelompok tersendiri, bukan bagian dari Arab ataupun Turki. Dengan kesamaan masalah ini, kelompok Kurdi memiliki cara masing-masing dalam menghadapinya, saat ini ada PKK yang berada di Turki sebagai organisasi separatis terlarang walaupun berhenti dan mencoba berdamai dengan pemerintah Turki. Ataupun juga KDP yang menjadi partai politik resmi di Irak yang telah lama berdiri dan menguasai pemerintahan regional Kurdistan Irak. Kedua kelompok ini adalah kelompok terkuat yang saat ini juga saling berusaha untuk menyebarkan pengaruh di Kurdistan Raya termasuknya Suriah.

3. Politik Kurdistan Dalam Revolusi Suriah 2011

Hubungan yang buruk antara PKK dan pemerintah pada tahun 1998 membuat para anggota PKK yang berada di Suriah mendirikan organisasi yang bernama PYD yang secara terbuka juga merupakan anggota dari KCK, walaupun tidak mengakui bagian ataupun menjadi cabang PKK di Suriah. PYD memiliki merupakan salah satu partai Kurdi terkuat di Suriah, walaupun etnis Kurdi di Suriah memiliki preferensi politik PUK maupun KDP karena kedua partai tersebut juga memiliki pengaruh yang kuat di wilayah Kurdistan. YPD sendiri ini dibentuk pada tahun 2003 yang menjadi respon Perjanjian Adana antara Turki dan Suriah pada tahun 1998 setelah Turki mengalami kudeta militer setahun sebelumnya, perjanjian ini memuat penguatan keamanan perbatasan yang juga membuat PKK menjadi gerakan terlarang di Suriah.

Setahun setelah PYD terbentuk, terjadi kerusuhan di Qamshili yang mengakibatkan 23 orang etnis kurdi meninggal dan puluhan di penjara dan disiksa. Kerusuhan ini disebabkan oleh kisruh para pendukung di pertandingan sepak bola antara klub arab melawan kurdi yang menyebabkan meninggalnya 6 suporter dari pihak kurdi dan menyulut demonstrasi anti Assad di kota mayoritas kurdi seperti Kobane, Hasakah dan Afrin (Syria:direct, *Qamishli Kurds commemorate 2004 uprising*). PYD menganggap, sepanjang tahun 1998 hingga 2004 merupakan tahun-tahun penuh kekerasan yang dilakukan oleh rezim Bashar al-Assad, dikarenakan dimasa pembentukannya di tahun 2003 banyak anggota PYD yang dipenjarakan dan setahun setelahnya PYD membentuk unit perlindungan rakyat atau YPG (*Yekenyen Parastina Gel*) sebagai organisasi

sayap militer bagi PYD sebagai respon dari demonstrasi yang terjadi di beberapa kota (YPG: People's Protection Units).

Sebagaimana dengan PKK, PYD yang juga pemain baru memiliki pesaing seperti KDP Suriah KDPS yang merupakan KDP Irak yang berada di Suriah. KDPS dan beberapa partai lain yang telah berdiri lama banyak melakukan aliansi dengan oposisi suriah anti pemerintah, pada tahun 2005 beberapa partai tersebut melakukan deklarasi dan bersatu dalam sebuah pakta deklarasi yang dibuat pada tahun 2005 untuk mengkritik kebijakan Bashar Al Assad yang anti otoritarianisme walaupun tidak bertahan lama dan bubar pada tahun 2009 (Caves, 2012). Pada tahun yang sama partai-partai tersebut membuat Kongres Politik Kurdi yang menurut Harriet Allsop memiliki tujuan untuk membangun pengakuan hak etnis kurdi sebagai bagian terpenting dalam masyarakat Suriah dan menuntut hak budaya dan agama minoritas masyarakat Suriah (Allsopp, 2015, hal. 243). Posisi kongres ini dalam kelompok oposisi adalah sebagai representatif dan menghilangkan stereotip buruk masyarakat kurdi yang dianggap separatis.

PYD tidak tergabung kedalam kongres karena adanya tidak setujuan dalam pengambilan keputusan dalam kongres yang mengikutsertakan kelompok non kurdi karena selama ini posisi pergerakan politik etnis kurdi tidak dianggap kuat oleh oposisi. Kongres politik Kurdistan tetap berlanjut untuk bernegosiasi dengan kelompok oposisi yang tergabung kedalam Dewan Nasional Suriah (*Syrian National Council, SNC*) dan Badan Koordinasi Nasional untuk Perubahan Demokrasi (*National Coordination For Democratic Body, NCB*) yang juga dilakukan oleh PYD. Bentuk partisipasi ini merupakan usaha etnis Kurdi yang

berkeinginan untuk mendapatkan pengakuan jika nanti ada perubahan sistem. Walaupun pada akhirnya PYD sendiri keluar dari NCB dikarenakan kurangnya komitmen yang kuat pihak oposisi dalam mengakui hak etnis Kurdi dalam beberapa pertemuan yang dilakukan oposisi.

Kubu kongres politik Kurdistan yang selama ini lebih membaur dengan kelompok oposisi cukup merepresentasikan masyarakat kurdi di hadapan pemerintahan Suriah. Keberadaannya dalam kelompok oposisi membuat aliansi itu menjadi kekuatan heterogen tidak hanya diisi oleh etnis Arab ataupun ideologi Islam saja. Melihat hal ini pemerintah berusaha menarik dukungan orang kurdi dengan memberikan kewarganegaraan pada beberapa masyarakat kurdi yang berstatus *stateless* dan juga menetapkan hari Newroz sebagai hari libur nasional yang termuat dalam dekrit nomor 49 (*Ibid*, Allsopp, 2015, hal. 63).

Aliansi kongres secara tegas menentang keputusan pemerintah yang menyelenggarakan acara Newroz yang digelar di 18 kota besar dan menganggap legalitas tersebut sebagai dalih untuk melunakan masyarakat Kurdi dan pada tahun 2009 terjadi beberapa protes yang menyebabkan puluhan orang ditangkap. Berbeda dengan PYD yang memiliki posisi sebagai rival Kongres, yang ikut merayakan kongres sebagai pada tahun 2010. Adapun perayaan tersebut dihadiri sekitar 200.000 hingga 400.000 dikota Raqqa dan dari seluruh jumlah peserta perayaan tersebut didominasi oleh anggota PYD. (*Ibid*, Allsopp, 2015, hal. 163).

Rivalitas antara PYD dan Kongres Politik Kurdi tetap berlanjut hingga masa awal pecahnya perang saudara Suriah. Anggota Kongres Politik Kurdi

mengubah aliansi ini menjadi Kongres Nasional Kurdistan (KNK atau *Kurdistan National Congress*, KNC) pada tahun 2011. Pembentukan Kongres ini menurut Harriet Allsopp sangat penting bagi masyarakat kurdi di Suriah, dalam beberapa pertemuan kongres tersebut banyak membicarakan solusi dengan beberapa pendekatan baru masyarakat Kurdi. Dalam kongres yang lebih banyak mengikutsertakan kelompok pemuda dengan ideologi ultranasionalis sayap kanan, dan dalam kongres ini terlihat adanya keberhasilan untuk menyatukan suara suara masyarakat Kurdi (Allsopp, 2015, hal. 247). KNK memiliki Koordinasi yang kuat dengan Kongres Nasional Suriah (atau *Syria National Congress*, SNC) sebagai kekuatan oposisi kala itu. Dengan ini situasi politik dan tuntutan pihak oposisi menjadi semakin kompleks karena dinamisnya permintaan masyarakat kurdi yang menginginkan sebuah demokrasi.

Berbeda dengan PYD yang menjadi saingan KNK. PYD juga membentuk aliansi alternatif bernama Angkatan Bersenjata Uni Demokrat Kurdistan dan mengubah namanya menjadi Dewan Rakyat Kurdistan Barat atau DRKB pada Desember 2011. Pembentukan aliansi ini memiliki dasar kritik terhadap KNK yang terlalu banyak dipengaruhi oleh Kongres Nasional Suriah yang memungkinkan akan memomorduakan etnis kurdi di Suriah jika berhasil menumbangkan Bashar al Assad. Struktur aliansi ini berbeda dengan KNK yang mana partisipan dan anggotanya tidak hadir sebagai representasi dari berbagai kelompok yang telah bergabung, berbeda dengan KNK yang anggotanya merupakan perwakilan dari 12 aliansi sedangkan DRKB berisikan 5 anggota partai pendukung PYD yang semuanya berideologi sayap kiri.

Perbedaan visi antara KNK dan PYD akhirnya menyebabkan perselisihan dan konflik baru dalam politik masyarakat Kurdi, kedua kelompok ini saling tuduh menuduh sebagai kepanjangan tangan dari rezim berkuasa. PYD menuduh bahwa KNK beserta koalisi posisi pemerintah non Kurdi lainnya telah gagal melengserkan rezim Bahsar, dan KNK mengatakan bahwa PYD merupakan alat Rezim yang selama ini digunakan untuk menghalau pengaruh Turki di Suriah karena kedekatan PYD dengan PKK yang selama ini menjadi musuh Turki. Hubungan antara pendukung PYD dan KNK memanas disela awal awal perang suriah berkecamuk yang dikobarkan Pasukan Pembebasan Suriah pada tahun awal konflik.

Pada tahun 2012 intensitas pertempuran semakin meningkat membuat permintaan hak penentuan sendiri dan desentralisasi politik kian meningkat, hal itu ditolak oleh Dewan Keamanan Suriah yang merupakan bagan terbesar dari KNK. Penolakan itu ditakutkan akan menyamakan tujuan utama dari koalisi pemberontak untuk mewujudkan Suriah Arab yang baru, terlebih tekanan itu juga datang dari kalangan muda Kurdi yang menyerukan “Here is Kurdistan” pada tanggal 20 April dalam merespon tindakan penyerangan yang dilakukan oleh tentara Suriah di Aleppo. Jika KNK melakukan upaya lobi politik, PYD justru mulai melakukan penjagaan ketat di wilayah mayoritas Kurdi hingga keperbatasan dengan membuat *Check Point* dan Dewan Rakyat, untuk menunjukkan bahwa PYD mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat Kurdi dan mengancam KNK. (*Ibid*, Allsopp, 2015, hal. 252)

Penjagaan ketat ini juga dikarenakan banyaknya tentara Suriah yang dikirim ke wilayah yang dikuasai oleh para pemberontak di kota besar dan membuat kontrol pemerintah di wilayah Kurdi oleh tentara Suriah menjadi lengang. Begitupun dengan kontrol oposisi yang juga memfokuskan pertempuran dengan tentara Suriah dan tekanan lobi dari KNK semakin menyulitkan gerak oposisi terutama Dewan Nasional Suriah dan Tentara Pembebasan Suriah yang tetap menganggap bahwa KNK merupakan kelompok separatis.

Pertikaian antara KNK dan PYD hanya sebatas usaha mencari pengaruh masyarakat Kurdi karena orientasi politik yang berbeda. KNK lebih mengedepankan proses damai namun PYD menggunakan cara angkat senjata jika diperlukan, bahkan dalam pertikaian antara dua kubu kurdi ini sendiri sempat panas saat anggota KNK yang menurut KurdWatch pernah melakukan penculikan terhadap 12 aktivis KNK di kota Efrin (KurdWatch, 2012) dengan tujuan melemahkan pengaruh KNK di depan masyarakat Kurdi.

Melihat pertikaian yang terjadi, Pemerintah Regional Kurdistan (*Kurdistan Regional Government*, KRG) Irak mencoba ikut campur dengan tujuan menengahi pertikaian keduanya dan mengajak para kedua representatif partai untuk bertemu di kota Arbil pada 11 Juni 2012 untuk mencari jalan keluar. KRG mencoba bersikap netral dalam konflik yang terjadi, walaupun KRG merupakan salah satu pelopor berdirinya KNK dan didukung penuh oleh presiden KRG, Massoud Barzani pada tahun 2011 (CARNEGIE, 2012) yang juga mendukung upaya damai perselisihan tersebut dalam pertemuan di Arbil. Dalam perang Suriah, KRG memihak pada kelompok oposisi, kepentingannya dalam memfasiliasi upaya damai

tersebut ialah agar PYD ataupun KNK dapat bersatu melawan Bashar al Assad dan membentuk wilayah Demokratik Konfederalis. Pertemuan ini menumbuhkan perjanjian damai untuk membentuk Komite Besar Kurdistan (*Supreme Kurdish Committee, SKC*) dan ditandatangani pada 1 Juli (*Opcit, Allsopp, 2015, hal. 259-260*).

Pembentukan SKC yang digadag-gadang akan menyatukan politik masyarakat Kurdi muncul beberapa spekulasi akan membuat PYD mendominasi dalam komite, karena sebelumnya telah melakukan gerak pengamanan di beberapa wilayah dan menculik anggota KNK. Dalam paper yang berjudul “*Unity Or PYD Power Play?*” ditulis oleh (Tanir, Wladimir , & Hossino, 2018, hal. 19) menjelaskan adanya sebuah bias terhadap PYD yang menguasai kepentingan yang monopolistik di area Kurdi. Pasalnya PYD yang melanggar pasal ketentuan perjanjian tentang kendali keamanan bersama (*Joint Control*) karena tidak menarik pasukan YPG yang sebelumnya telah mengontrol beberapa kota mayoritas Kurdi, karena komite sendiri tidak mengakui keberadaan YPG sebagai sayap militer PYD terpenting dalam area Kurdi yang baru. PYD juga dianggap telah menyuap beberapa pejabat untuk menjual aset milik SKC hingga membuat dewan lokal KNC di Amuda memilih untuk menunda penandatanganan perjanjian Arbil.

Bagaimanapun pembentukan SKC tersebut memiliki dampak sangat besar terhadap penyatuan masyarakat Kurdi di Suriah selama berlangsungnya perang. Ini sekaligus menjadi babak baru bagi Kurdistan Suriah dalam mewujudkan daerah yang dikontrol sendiri (*Self-Rule Area*) dan maju dalam mewujudkan

daerah konfederalis demokratik yang selama ini di cita-citakan, baik PYD maupun KNK.

B. Revolusi Rojava Dan Pertempuran Kota Kobani

1. Penyerbuan Kota Kobani dan Signifikansinya

Penyerangan kota Kobani merupakan serangan ISIS yang paling parah di NSR setelah kota Hasakah, menurut *The Telegraph* (Isil attack on Kobane is 'second biggest massacre' of civilians by the group in Syria, 2015), ISIS telah menjadikan Kobani sebagai tempat jagal terbesar kedua bagi korban sipil. Penduduk kota ini diteror di jalanan melalui serangkaian bom bunuh diri, penembak jitu, dengan roket ataupun membunuh mereka di rumah. Banyak pihak memaknai serangan ISIS di Kobani secara serius terutama AS. Menurut *Time* dan *Washington Post* cepatnya strategi ISIS atas penguasaan Kobani menunjukkan betapa rapuhnya dan gagalnya strategi AS dalam perang Suriah (Thompson, 2014). Pentagon mengatakan bahwa militer AS di Suriah akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melawan ISIS. Pasukan AS yang selama ini banyak melakukan serangan terhadap pemerintah Suriah berencana mengurangi jumlah penyerangan dengan memfokuskan ISIS sebagai target utama dalam Perang Suriah.

Media *Vice* memaknai Kobani merupakan 'Stalingrad di Perang Suriah' ('Welcome to Stalingrad. Welcome to Kobane': Inside the Syrian Town Under Siege by the Islamic State, 2015), karena skema pengepungan yang dilakukan ISIS tak jauh berbeda dengan Nazi di masa perang dunia kedua, pasukan YPG

secara menerus bertahan walau dihadapi oleh kondisi dikepung. Titik baliknya pun sama, Staliningrad yang selama perang dunia telah menunjukkan kehancuran dan menjadi titik awal kemajuan Uni Soviet, Kobani pun juga direbut secara cepat oleh YPG di minggu ke empat setelah penyerangan ISIS. Pasukan kurdi *Peshmerga* Irak dan Tentara Pembebasan Suriah memberi bala bantuan pasukan dan persenjataan melalui jalur perbatasan Turki di utara pada akhir Oktober hingga Awal November 2015 (Kurdish peshmerga forces enter Syria's Kobani after further air strikes, 2014). Bala bantuan juga diberikan dari AS dan koalisi udara melalui serangan udara yang 76% diarahkan ke kota ini.

Pertempuran Kobani membuat hubungan antara NSR dengan pihak musuh menjadi fluktuatif. Pasukan pembebasan Suriah yang awalnya menentang pembentukan NSR namun juga ikut mendukung pasukan yang bertahan dengan mengirim 50 hingga 200 pasukan. Ataupun juga *Peshmerga* yang memberi bala bantuan persenjataan berat padahal KRG selama ini memiliki hubungan dengan NCB yang tidak mengakui NSR sebagai wilayah kurdi yang telah dibebaskan.

AS pun juga menghadapi keputusan terberat karena menjadikan YPG menjadi pasukan proksi dalam perang melawan ISIS. Padahal YPG sendiri yang memiliki ikatan dengan PKK dan AS telah menganggapnya sebagai organisasi teroris sejak tahun 90-an. Menurut Rod Thornton (2015: hal, 878). Dengan menjadikan militan YPG sebagai sekutu baru dalam melawan ISIS. Keputusan AS dan koalisinya tersebut bukanlah hal yang bagus dan akan mengrenggangkan hubungan AS dengan Turki, (Thornton, 2015) lebih tepat menyebutkan sekutu YPG sebagai "*my enemy's enemy is my friend*", walau secara efektif YPG

memiliki kekuatan darat yang cukup kuat dalam garis depan pertempuran. AS menganggap bahwa pertempuran Kobani ini merupakan peperangan melawan ISIS semata-mata dan membantu pasukan pertahanan yang terlibat didalamnya terutama pasukan *Peshmerga* dari KRG yang selama ini memiliki jalinan yang baik dengan beberapa negara seperti Turki misalnya.

Usaha dan dukungan pasukan gabungan dari beberapa kelompok militan dan dukungan membawakan hasil yang cukup signifikan. Hingga Desember, YPG secara perlahan menguasai 70% kontrol area di Kobane dan Januari 2019 kota ini dikuasai kembali oleh YPG secara total. Dengan cepat kota ini berhasil dibebaskan dari ISIS hanya dalam waktu 4 bulan. Kegembiraan atas kemenangan tercipta dari berbagai pihak, pasukan *Peshmerga* dan YPG saling membaur dan melakukan selebrasi dengan menari-nari diseluruh kota, para pengungsi yang tertahan di Turki juga turut bergembira dan merencanakan kepulangan mereka. Kobani menjadi simbol perlawanan ISIS, monumen pembebasan dibuat tengah perkotaan dan secara perlahan kota ini dibangun.

Pembebasan Kobani menjadi bagian terpenting dalam Revolusi Rojava, *Crethi Plenthi* dalam artikelnya (Kobani: A Symbol of Kurdish Resistance, 2015), membuat analisa bahwa kekalahan ISIS membawa beberapa implikasi dimasa mendatang.; Pertama, bahwa ISIS gagal dalam memperlebar wilayah di sepanjang perbatasan Suriah-Turki, karena selama ini wilayah Turki merupakan jalur strategis para tentara asing yang ikut berperang bersama ISIS.; Kedua, peristiwa pembebasan Kobani merupakan momentum kebangkitan moral militan Kurdi Suriah terutama YPG dan bahkan militan Kurdi di Irak. Karena menurut *Rudaw*

(Divided Syrian Kurds reach deal in face of ISIS threat, 2015) semasa terjadinya krisis penyerangan presiden KRG, Massoud Barzani melakukan pertemuan dengan YPG di kota Dohuk untuk berkomitmen melakukan kerjasama penyerangan terhadap ISIS baik Suriah maupun Irak.; Dan ketiga, kekalahan ISIS di Kobani mungkin saja akan membuat ISIS kehilangan beberapa wilayah lainnya karena peristiwa pembebasan ini menjadi cerminan betapa kuatnya aliansi barat dan berbagai pihak hingga menumbuhkan hasil yang cukup efektif dalam mengusir ISIS dalam tempo cepat.

Benar saja, setelah kesepakatan Dohuk dan Kobani dibebaskan, NSR membentuk strategi baru untuk berfokus membebaskan wilayah ISIS lainnya. Hal itu disampaikan Idris Nassan, seorang pejabat NSR di Kobani, melalui *Reuters* (Syria's Kurds celebrate after winning Kobani, but self-rule far off, 2015) mengatakan “Ini kemenangan bagi masyarakat Suriah, namun Kobani baru langkah pertama. Kami akan tetap melawan ISIS, jika mereka kembali di Suriah ataupun di Irak mereka akan tetap menyerang kita.” terangnya. Gempuran yang dilakukan YPG selanjutnya mengarah ke berbagai arah, pada akhir 2015 YPG berhasil membebaskan beberapa kota seperti Tal Abyad, Hasakah, Pinggiran Utara Aleppo dan Al Hawl. Dilanjutkan pada tahun berikutnya dengan membebaskan kota seperti Al, Shaddadi, Manbij, dan Raqqa yang diperkirakan selama ini menjadi ibu kota ISIS.

Pembebasan Kobani juga menjadi daya tarik militan lain yang berperang terutama dari militan lintas etnis dan juga militan berideologi kiri yang anggotanya berasal dari Eropa, Batalion Pembebasan Internasional (*International*

Freedom Battalion, atau IFB) salah satunya. Menurut sebuah tulisan di *Medium.com* tentang (International Freedom Battalion, 2018), Ideologi sosialis dan cita cita NSR yang anti fasis menjadi daya pikat masyarakat global yang berideologi sosialis, komunis dan anarkis untuk berpartisipasi menjadi militan. IFB sendiri pada Juni 2015 dan anggotanya berasal dari kalangan organisasi kiri yang kebanyakan dari Turki dan beberapa berasal dari Spanyol, Yunani, Perancis dan Inggris. Walau begitu setiap anggota sebenarnya memiliki alasan politik yang berbeda beda, sebagian dari mereka ingin menjadikan revolusi ini (Revolusi Rojava) sebagai perjuangan terpenting dalam hidup mereka.

Selain IFB, juga terdapat beberapa kalangan kulit putih berasal dari Eropa yang bergabung menjadi pasukan YPG dan YPJ. Video laporan mini *Vice* dalam situs *Youtube* (*Foreigners Fighting ISIS in Syria: The War of Others*, 2016) menceritakan tentang beberapa orang kulit putih berasal dari Kanada, Jerman, Italia dan Polandia dalam bergabung dengan YPG dan YPJ. Kegeraman mereka atas kekejaman yang dilakukan ISIS dengan menyebarkan video propaganda pembunuhan ataupun serangan bom dan beberapa serangan teror lainnya yang menargetkan sipil dan badan keamanan di Eropa dan Amerika Utara menjadi alasan mengapa mereka memutuskan untuk bergabung.

Media *France24* juga membuat video serupa dengan judul *FRANCE 24* (Video: *FRANCE 24 meets foreigners fighting with Kurds in Syria*, 2017) yang memuat tentang pertemuannya dengan tentara asal Perancis. Mereka mengatakan bahwa para pejuang asing tersebut terdiri dari berbagai umur, dari umur 19 hingga 55, Mereka memiliki posisi sejajar dengan militan yang berasal dari etnis kurdi

lain, bahkan sebagian memiliki pangkat yang lebih tinggi. Beberapa dari mereka ditempatkan di barisan terdepan dan dilatih untuk membebaskan kota-kota besar, walaupun sebagian dari juga memiliki pengalaman militer di negara mereka-mereka. Mereka datang secara sukarela dan perasaan yang tergugah melihat orang kurdi berjuang secara sendiri melawan ISIS dan menegakan demokrasi di negaranya (*Ibid, Vice*).

Pasukan YPG selama ini juga cukup terbuka terhadap orang asing yang bergabung, mereka berinisiatif mengajak orang asing membantu Revolusi dan menjadi tentara melalui situs “YPG-international.org”. Dalam situs tersebut mereka juga menampilkan penghargaan bagi perjuang asing yang telah gugur dalam beberapa pertempuran.

Militan lintas etnis yang berperang bersama NSR terdiri dari etnis Arab, Asyur, Turkmen, dan lain sebagainya. Mereka membentuk militan sendiri seperti *Khabour Guards* dari kalangan etnis Asyur (Zaman Al Wasl, 2017), *Seljuk Brigade* dari kalangan etnis Turkmen (Conflict between US-led coalition allies increases, one Turkish soldier killed, 2016), *Desert Hawks Brigade* dari etnis Arab (Kurdish-led SDF attracts more Arab fighters in Syria’s Deir ez-Zor amid growing anti-ISIS campaign, 2016), dan lain sebagainya. Partisipasi ini muncul dikarenakan ekspansi YPG yang luas hingga keluar dari wilayah yang di dominasi oleh etnis Kurdi, disisi lain mereka secara sukarela karena dendam atas penguasaan ISIS di wilayah mereka.

Melihat luasnya cakupan NSR dan banyaknya partisipasi berbagai pihak untuk berperang bersama YPG, NSR melakukan perubahan strategi dan unit militer pada tahun 2015 setelah mengambil alih kota Hasakah dengan membentuk Pasukan Demokratik Suriah atau SDF (*Syrian Democratic Force*). AS memiliki peranan penting dalam pembentukan SDF karena selama ini AS dicap tidak konsisten dalam membantu YPG yang dicap teroris karena dekat dengan PKK, sehingga AS mendorong beberapa militan yang sebelumnya memerangi ISIS untuk membentuk suatu koalisi. Pada mulanya SDF banyak merekrut anggota militan dari berbagai latar etnis dan agama seperti Kurdi, Arab, Kristen Suriah, dan Turkmen, karena SDF sendiri terbentuk atas pakta yang dibuat oleh 13 militan lintas etnis, agama dan ideologi seperti YPG, YPJ, Sanadid Force, Syriac Military Council, Jaysh al Thuwar, Kita'ib Shams al Shamal, Jabath al Akrad, Liwa Jun al Haramyn, Liwa al Salajaqa, Arfad Revolutionary Battalion, Euphrate Martyrs Battalion, Free Officer Union, dan Liwa Tahrir al Furat (Casagrande, 2016).

NSR juga berubah menjadi Konfederasi Demokratik Suriah Utara lewat konferensi yang diselenggarakan di kota Al Malikiyah atau Derik pada 27-28 Juni. Pertemuan ini dihadiri oleh Dewan Pengaturan untuk menuntaskan amandemen kontrak sosial yang telah dibahas dalam pertemuan pada bulan maret lalu. Menurut *Al Monitor* dalam (*Syria Kurds Federalism Regime Opposition Rejection*, 2018), para dewan pemerintah NSR dan dewan perwakilan etnis Arab, Kurdi, Asyur dan lain sebagainya membuat pertimbangan sekali lagi dalam memperoleh sistem federasi menggantikan sistem kesatuan. Mereka menginginkan bahwa perubahan sistem federal ini dapat diterima oleh pemerintah

Suriyah itu sendiri, karena mereka tidak ingin menghilangkan kesan memisahkan diri dari pemerintah Suriyah. Mereka juga mengklaim bahwa sistem federal merupakan sistem yang cocok dan solutif untuk krisis yang melanda Suriyah selama ini. Terlebih Bashar Al Assad sendiri pernah berpendapat bahwa Suriyah sebagai negara yang kecil, sangat mungkin dapat menerapkan sistem negara federal.

Amandemen NSR ini juga langkah untuk mendapatkan pengakuan internasional, walau statusnya sebagai konfederasi NSR selama ini tidak dapat diterima sebagai bagian dari pemerintah Suriyah oleh komunitas Internasional. Oleh sebab itu dalam media yang sama dengan judul (*After approving constitution, what's next for Syria's Kurds?*, 2016) Pertemuan pada juni tersebut merupakan tahap final yang dalam pembahasannya menghilangkan nama “Rojava” dan menambahkan istilah “Demokratik” menjadi Federasi Demokratik Suriyah Utara atau DFNS (*Democratic Federation of Northern Syria*), menjadikan kota Qamshili menjadi ibukota, mempersingkat pasal atau artikel menjadi 85, dan konstitusi juga mewajibkan pemuda untuk bergabung SDF untuk mewujudkan wilayah federal yang aman bagi mereka. Walaupun Rojava telah dihilangkan, namun bagi beberapa kalangan istilah tersebut masih tetap digunakan dalam menunjukkan sebuah identitas politik federasi demokratik tersebut.

Sejak tahun 2015 hingga 2016, PYD dan dan Rojava telah memiliki beberapa misi diplomatik dan mendirikan kantor representatif di AS, Rusia dan beberapa negara Eropa. Pendirian kantor representatif (*Foreign Relation Commision, Kanton Al-Jazeera, 2018*) memiliki fungsi untuk membangun

hubungan kepada komunitas, pemerintah negara, institusi sipil, dan institusi HAM dan mengatur pertemuan dengan pihak luar ataupun melaporkan beberapa laporan dan permintaan atau bantuan apa yang dibutuhkan di Suriah Utara. Instrumen dalam misi diplomasi sejauh ini dapat dikatakan berhasil terutama dari kalangan NGO. Semenjak terusirnya ISIS dari Kobani, pemerintah Rojava membuka peluang bebas bagi NGO untuk masuk dan membangun kota Kobani yang hancur dengan memberikan bantuan seperti pelayanan kesehatan, suplai air hingga pembersihan ranjau darat sisa pertempuran. Bantuan tersebut didapatkan setelah perkumpulan NGO tersebut berkumpul pada pertemuan Internasional Summer Social yang diadakan pada 1 Juli 2015.

Namun dalam skala negara bangsa, pengakuan Rojava cukup sulit dan terbatas. Kepentingan kelompok negara hanya berhenti pada bantuan dan aliansi militer kepada SDF dan YPG karena keberhasilannya dalam merebut kota yang diduduki ISIS, dan ini membuat kedudukan kantor representatif juga menjadi sarana dalam aktifitas lobi politik, seperti misalnya di AS yang menganggap pentingnya YPG dan SDF namun tidak mengakui Rojava sebagai otonomi regional atau kantor pemerintahan, melainkan hanya sebagai kantor partai politik asing.

Berbeda dengan Rusia yang memiliki ikatan yang berkembang dengan Rojava, terlebih setelah Rojava membuka kantor perwakilan di Moskow tahun 2016. Dalam pembaharuan konstitusi Suriah sebagai bagian dari rangka proses perdamaian, Russia mendukung pembentukan desentralisasi kekuatan dalam draft konstitusi yang diajukan. Menurut (Now., 2016: "*Russia finishes draft for new*

Syria constitution: report”), Rusia membuat beberapa draft rujukan yang salah satunya meminta pemerintah Suriah untuk mengangkat pemerintah lokal agar hak agama dan suku minoritas dapat terjamin.

Selain AS, Rusia juga melakukan kerjasama pertahanan dengan berinisiatif membentuk operasi gabungan yang dilakukan di kanton Deir ez-Zor. Hal itu disampaikan dalam konverensi pers oleh komandan mabas angkatan udara Rusia Khmeimim, Jenderal Yevgeny Poplavsky dan Jubir YPG, Nuri Mahmoud di kota al-Sahiliyah pada 3 Desember 2017 yang operasi gabungan tersebut adalah bagian dari kerjasama antara AS dan Rusia dalam memerangi ISIS secara lengkap. Rojava memilih mendekat dengan Rusia dalam hal politik, perwakilan PYD percaya bahwa pendekatan politik ke Rusia akan membawa Rojava kedalam meja perundingan yang bersamaan dengan Bashar al-Assad, terlebih Rusia merupakan sekutu utamanya dalam konflik ini (Al-Monitor, 2017; *Kurds move closer to Russia*).

Selain AS dan Rusia, Rojava juga membangun hubungan dengan negara Uni Eropa diluar urusan militer. Salih Muslim, pemimpin YPG pernah melakukan kunjungan resmi ke Jerman dan Perancis dalam mewakili NSR. Menurut (Öğür & Baykal, 2017, hal. 68), pertempuran Kobani juga memberi dampak signifikan bagi menarik minat negara Uni Eropa telah menjadi partner ideologis karena memiliki kesamaan dalam mempertahankan nilai sekularisme. Ketertarikan selanjutnya lebih banyak datang dari jurnalis barat yang juga telah berkunjung ke Kobani. Tulisan dan laporan banyak memuat tentang peranan wanita dalam struktur pemerintahan dan militer, khususnya dalam pertempuran Kobani dan pembebasan

wanita Yazidi oleh tentara YPJ, seolah menambah kesan selama ini wanita kurdi memiliki perana penting dalam melawan ISIS. Seperti contohnya, pada saat majalah Marie Clarie di Perancis memuat tentang pasukan wanita Kurdi yang membuat beberapa perwakilan wanita tersebut diundang oleh Presiden Perancis, Francois Hollande dan dianggap sebagai “Pahlawan Kobani”.

2. Pembentukan Federasi Suriah Utara - Rojava

PYD yang memiliki pengaruh besar dalam kongres memiliki wacana besar terhadap pemerintahan yang diatur sendiri tersebut. Setelah perjanjian Arbil wilayah kurdi Suriah memasuki era yang disebut “Revolusi Rojava”, Rojava memiliki arti “Barat” dalam bahasa Kurdi untuk menyebutkan pemetaan wilayah Kurdi di Suriah untuk merujuk wilayah tersebut sebagai bagian Barat Kurdistan Raya. Revolusi Rojava memiliki makna sebagai revolusi politik dan revolusi sosial, revolusi politik sebagai mana disebutkan sebelumnya bahwa PYD sebagai wakil politik orang kurdi berwacana mewujudkan suatu pemerintah sendiri untuk masyarakat kurdi itu sendiri. Revolusi politik Rojava terbentuk secara bertahap dari 2012 hingga 2014 yang mana PYD mulai membuat institusi-institusi pemerintahan regional legal formal dan PYD juga membawa nilai sosial yang berpengaruh kepada masyarakat itu sendiri.

SKC menjadi organisasi yang memiliki peran mengatur urusan hubungan internasional, kebutuhan air minyak dan gas serta infrastruktur untuk masyarakat, dan keamanan yang ketiganya diatur dalam bagian terkecil dari SKC diluar dari komite anggota partai (*Opcit*, Tanir, Wladimir , & Hossino, 2018, hal. 10). Pada

tahun 2012, hanya dapat mengatur 60% dari total wilayah yang dihuni mayoritas Kurdi, lalu berkembang hingga 80% pada Februari 2013.

Pemantapan organisasi selanjutnya pemerintah baru terlaksana pada tahun 2014, dimana SKC membuat badan Administrasi Otonomi Demokratik (*Democratic Autonomous Administration, DAA*) yang tujuannya untuk menggerakkan pemerintahan Federasi Suriah Utara – Rojava (atau di singkat NSR, *North Syrian Rojava*, ataupun disingkat Rojava saja). DAA membawahi tiga kanton Rojava yaitu Jezire, Afrin dan Kobani yang ketiga kanton tersebut masing masing memiliki badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang bergerak sendiri. Sistem desentralisasi yang diterapkan juga membuat DAA yang menurut klaimnya lepas dalam urusan perundang-undangan, ekonomi, keamanan, dan hubungan antara masing masing kanton dan musipalitas yang diatur dalam konstitusi federal (Khalaf, 2016, hal. 11).

Rojava membentuk konstitusi federal bernama pakta kontrak sosial Rojava (*The Social Contract of Rojava*) pada tahun 2014. Pakta kontrak sosial yang digunakan dalam landasan konstitusi melampaui lebih jauh tidak hanya sekedar sebagai landasan sebagai pedoman pemerintahan melainkan juga sebagai kesepakatan sosial bagi masyarakat yang hidup didalamnya. NSR menggunakan pakta tersebut karena melihat bahwa wilayah dihuni oleh masyarakat multietnis yang terdiri dari etnis Arab, Asyur, Kasdim, Armenia, Chechen, dan Turkmen yang dijamin kebebasannya, keterlibatannya dalam proses demokrasi, dan kesetaraan etnis dan gender (PeaceInKurdistan.Com, 2014).

Dalam pasal ke 15, PYD secara penuh memegang kendali keamanan militer di ketiga kanton, sedangkan dalam urusan keamanan internal dipegang oleh “Asayish” yang memiliki fungsi mengatur kebijakan yang diperuntukan bagi sipil. Untuk menghilangkan diskriminasi gender, pakta sosial juga mengangkat posisi perempuan setara dengan laki-laki dalam kaca mata hukum yang dimasukkan dalam Artikel 26 dan 28, dan memiliki hak dalam berpartisipasi didalam kehidupan politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan, serta membebaskan wanita berkerja dalam institusi negara (*Ibid*).

Faham kesetaraan gender tersebut dibawa dan diadvokasi oleh Abdullah Ocalan dan diberi nama faham “Jineologi”, faham ini menjadi sebuah studi khusus yang dibawa oleh organisasi akademik dan konfederasi wanita *Yekitia Star* yang ikut mempraktekan secara langsung nilai ini ke masyarakat dan politik Rojava. Secara keilmuan, Jineologi secara kasar memiliki pengertian sebagai “*Science of Woman*” dan dalam setahun sekali akademi tersebut melakukan 12 sesi kursus yang diselenggarakan selama 15 hari. (Melis, 2016)

Peranan perempuan dalam pertahanan memiliki peranan sangat kuat, PYD memiliki unit perlindungan wanita atau YPJ yang merupakan salah satu milisi yang keseluruhan anggotanya diisi oleh perempuan. Situs *The Kurdish Project* mengklaim YPJ merupakan militan perempuan pertama di dunia dan memiliki cabang di Irak yang juga sangat penting perannya dalam pembebasan orang Yazidi di pegunungan Sinjar, Irak pada tahun 2014 (“YPJ: Women’s Protection Units”, *The Kurdish Project*). Menurut media *Independent*, YPJ memiliki

kekuatan menarik perempuan lain untuk berjuang bersama melawan musuh-musuh NSR terutama ISIS (McKernan, 2016).

NSR di tahun sebelumnya telah banyak membuka ruang pertempuran dengan kelompok oposisi maupun pemerintah karena posisinya yang terpisah dari kedua kubu tersebut. Pada tahun 2014 YPG terlibat kontak senjata oleh pasukan Suriah di kota Qamshili (Ibrahim, 2014). Dari kalangan oposisi PYD memiliki berbagai macam rentetan peristiwa yang panas dingin, pada November 2012 PYD terlibat kontak senjata di Ras al-Ayn dengan militan pembebasan Suriah selama seminggu yang menyebabkan 56 meninggal dalam pertempuran (Reuters, 2013) dan diakhiri dengan persetujuan damai setelah SKC datang untuk mewakili masyarakat Kurdi untuk berkerjasama melawan pemerintah (Rojhelat, 2013).

Melihat hubungan panas dingin dengan aktor utama *belligerent* di perang Suriah, permasalahan utama yang dihadapi di tahun awal pembentukan bukanlah dari kedua kubu tersebut, melainkan dari ISIS yang sangat berkembang pada tahun 2014. Sepanjang tahun 2014, ISIS melakukan penyerangan secara masif di wilayah yang dikontrol oleh pasukan YPG hingga membuat kota Kobani yang merupakan pusat kanton Kobani dikepung diakhir tahun 2014. Secara geografis, Kobani memiliki letak yang cukup sulit karena posisinya terhimpit berada tak jauh dari perbatasan Turki di utara sedangkan ISIS melakukan pengepungan dari segala arah dan rentan waktu dari bulan September hingga Oktober secara cepat ISIS berhasil mengasai 350 dari 354 desa di sekitar Kobani (Reuters UK, 2014). Serangan ISIS juga mengakibatkan lonjakan pengungsi Suriah menjadi

meningkat, menurut (The Daily Star, 2014) setidaknya ada 300.000 warga Suriah yang mengungsi ke perbatasan Turki akibat dari serangan di Kobani ini.

C. Kebijakan Turki atas Kurdistan Suriah

Keberhasilan militan PYD di Suriah membuat Turki cukup ketir. Pada bab sebelumnya, Turki secara telak memang menekankan kebijakan politik luar negeri untuk penjatuhan terhadap Bashar al-Assad. Turki tidak memperkirakan pasukan YPG dan partai PYD memiliki tempat dalam perang Suriah. Bahkan ironisnya pelarangan kegiatan PKK di Suriah menjadi kunci hubungan baik antara Turki dan Suriah saat kebijakan nol masalah mulai dilaksanakan Turki bahkan jauh pada tahun 1998.

Situasi diperparah disaat Rusia dan AS, dua koalisi besar dalam konflik yang lambat laun banyak mengadakan operasi gabungan dengan YPG/PYD. Turki berdiri sendiri menghadapi ancaman ancaman musuh lama mereka, terlebih YPG/PYD dan Bashar al-Assad memiliki hubungan yang sangat rumit namun tidak dapat dikatakan sebagai musuh sepenuhnya. Ditambah lagi, negara-negara dunia khususnya Eropa juga melirik YPG/PYD sebagai kunci utama kekalahan ISIS yang menjadi biang dari berbagai peristiwa teror di seluruh Eropa.

Sebelum lebih jauh ke Suriah. Permasalah PYD di Suriah belum cukup menjadi gerbang ancaman Turki menghadapi pasukan Kurdi Suriah. Apalagi Turki hanya melakukan singgungan yang tidak memiliki signifikansi besar, seperti sindiran Erdogan kepada negara koalisi barat yang hanya memfokuskan masalah Kobane. Bukan di Idlib, Homs ataupun Aleppo, ataupun Irak yang 40%

wilayahnya diduduki ISIS (Erdogan decries coalition's focus on Kobane, 2014). Namun Sindiran Turki malah menjadi boomerang yang menguatkan opini publik bahwa Turki adalah dalang simpatisan ISIS di level negara bangsa.

Titik awal ancaman keamanan kurdi bagi Turki justru datang dari dalam negeri dan ditenggarai oleh jaringan PKK yang berada di Turki itu sendiri. Nama PKK kembali muncul setelah puluhan tahun tidak pernah terdengar karena insiden bom mobil yang membunuh dua tentara Turki di kota Lice, provinsi Diyarbakir, pada 21 Juli 2015 (Turkey car bomb kills two soldiers as PKK truce breaks down, 2015). Pejabat militer menuduh PKK bertanggung jawab atas insiden tersebut. Namun anggota senior KCK, Demhat Agit membantah keterlibatan PKK dalam insiden itu, melainkan individu yang berasal dari kalangan Kurdi yang secara independen dan tidak terikat dalam organisasi tersebut (KCK official says PKK not responsible for murders of 2 Turkish policemen, 2015).

Bukan tanpa sebab, asal mula berasal dari protes di seantero Negara oleh karena serangan di kota Suruç di perbatasan Turki-Suriah oleh ISIS. Serangan yang menewaskan setidaknya 32 korban dan seluruh korban merupakan aktivis humaniter dari berbagai pendidikan tinggi dan organisasi politik sayap kiri yang hendak mengirimkan bantuan kemanusiaan ke kota Kobani. Masyarakat kurdi beropini bahwa serangan tersebut adalah bentuk akal-akalan pemerintah Turki khususnya AKP untuk menghambat lajunya pertumbuhan wilayah Suriah Utara (Kurdistan Suriah). Eskalasi konflik berkembang dan PKK kembali naik setelah bertanggung jawab atas pembunuhan dua polisi di kota Celanpinar selama protes berlangsung (Suruc massacre: 'Turkish student' was suicide bomber, 2015), dan

beberapa serangan lainnya yang tersangkanya diindikasikan berasal dari etnis kurdi.

Sejak saat itu, Turki secara serius menanggapi PKK sebagai sasaran dari dalam maupun luar selain menargetkan ISIS. Kepolisian Turki telah menangkap 1.000 orang yang dicuriagi memiliki koneksi dengan PKK, dengan total 847 orang sedangkan yang terafiliasi dengan ISIS sisanya dari seluruh penjuru Turki. Jubir pejabat pemerintah juga mengatakan bahwa Turki telah siap berperang menghadapi PKK. Dari luar negeri, pemerintah Turki juga tak segan mengkritik strategi AS, Perancis atau negara manapun khususnya Eropa yang melirik dan memberikan bantuan persenjataan kepada YPG dalam konflik Suriah.

Menurut Ashraf Mehmood, seorang pejuang YPG, Tank Turki juga melakukan serangan di desa dekat perbatasan di Kobane ke arah YPG yang sedang berperang melawan ISIS. Markas PKK Pegunungan Qandil, Irak juga mendapat serangan dari Turki. Jubir KCK, Zargos Hiwa mengatakan bahwa Turki benar-benar menghentikan proses perdamaian dengan etnis kurdi. Ia mengatakan serangan Turki tidak akan pernah berhasil, malah justru akan menghancurkan reputasi AS dimata etnis kurdi.

Eskalasi konflik juga masuk dalam politik domestik Turki, menurut analisis luar negeri majalah M'Sur, Ilya U Topper dalam (Nazish, 2015) menyebutkan tindakan Turki merupakan strategi Erdogan dan AKP untuk meminimalisir potensi pengaruh PKK masuk kedalam dewan legislatif untuk pemilihan umum Turki beberapa tahun yang akan datang. AKP sebagai partai yang telah sejak lama

menduduki kursi dominan, harus berkurang dikalahkan oleh partai Demokrasi Rakyat atau HDP (*Halkların Demokratik Partisi*) yang pro terhadap minoritas pada bulan yang sama. Partai ini baru berdiri pada tahun 2012 namun sudah mendapatkan 80 kursi di parlemen, setara dengan Partai Gerakan Nasionalis atau MHP (*Milliyetçi Hareket Partisi*) berideologi sayap kanan dan selama kampanye menjadi rival bagi AKP.

Padahal jika melirik di tahun-tahun sebelumnya, kebijakan AKP terhadap isu etnis kurdi sangat berbeda. Erdogan telah menyusun proses damai etnis kurdi dan pemberian paket demokrasi sebagai upaya akomodatif kebijakan militerisme Turki terhadap etnis minoritas. Salah satunya yaitu penghapusan kebijakan diskriminatif dan keterbukaan pluralisme budaya sejak 2002 hingga 2009 dengan mengajak dialog antara pemerintah dan perwakilan etnis Kurdi salah satunya Abdullah Ocalan. Hal ini dilakukan sebagai prasyarat bergabung Uni Eropa semata, namun pelaksanaan tersebut baru berjalan pada tahun 2013 disaat Uni Eropa melakukan pencatatan pencatatan penting tentang perlindungan HAM etnis Kurdi. Banyak hal yang diapresiasi, terutama penggunaan bahasa kurdi yang muali digunakan dalam acara publik secara formal maupun diajarkan di lembaga pendidikan sekelas universitas (Alfian, 2018, hal. 127-128).

Pada nyatanya, proses damai tersebut berlangsung sebentar. Menurut (Hakyemez, 2017, hal. 7), AKP tidak konsisten dalam menjamin hak berpolitik bagi warga Kurdi, tidak sebagaimana yang telah dijanjikan oleh rezim AKP pada negosiasi Juli 2014. Pada tahun 2015, Erdogan menolak rancangan road map yang dibuat Abdullah Ocalan, padahal beberapa hari sebelumnya partai AKP dan HDP

mendeklarasikan komitmen untuk mewujudkan tuntutan tersebut yang diumumkan di televisi nasional. Kebijakan AKP terhadap minoritas juga mengubah persepsi masyarakat terhadap stereotip etnis kurdi bahwa tidak semua etnis kurdi adalah teroris. Ini lah yang menjadikan HDP mampu memegang kursi legislatif dengan 13% total pemilih pada pemilu tersebut.

Sebenarnya HDP sendiri digadang-gadang akan menjadi koalisi dalam pemilu tersebut bersamaan dengan partai CHP dan AKP dalam melawan lawan politik sayap kanan, tetapi gagal karena terbelah atas perbedaan ideologi (Sayarı, 2016, hal. 4). Arah politik HDP mendukung desentralisasi politik di Turki juga membuat konflik politik Kurdi-Turki menjadi jelas, kritik yang disampaikan oleh beberapa pihak karena dekatnya HDP dengan PKK. Adalah Yalçın Akdoğan, wakil perdana menteri yang berkomentar kedekatan HDP dengan PKK akan menghambat proses perdamaian etnis kurdi. Edogan juga berkomentar HDP menjadi kepanjangan tangan di tubuh parlemen (HDP has inorganic link to PKK: Erdoğan, 2015).

Alasan terkuat dekatnya PKK dengan HDP ialah pemimpin partainya sendiri, Selahattin Demirtas yang meminta PM Davutoglu untuk menghentikan pelucutan senjata PKK dalam berbagai operasi sepanjang tahun 2015 yang akhirnya membuat ia dipenjara karena keterlibatannya dengan tindak terorisme bersama dengan Sirri Sureya, seorang penasehat hukum di partai yang sama (Turkey HDP: Court jails pro-Kurdish leader Demirtas, 2018).

Tendensi Turki-Kurdi kembali muncul kepermukaan, muncul bias akomodasi Erdogan terhadap etnis kurdi selama ini. Pada saat yang sama pemerintah Turki memutuskan untuk menghentikan proposal proses perdamaian karena terganjal oleh oposisi politiknya, HDP. Tetapi pada saat bersamaan, Erdogan juga membuat pernyataan untuk tidak menyamakan antara teroris PKK dengan Kurdi (Turki: 'Samakan Kurdi dengan teroris PYD/YPG adalah kesalahan fatal', 2019). Pernyataan tersebut merupakan strategi untuk meyakinkan publik atas konsistensi Erdogan yang selama ini dikenal sebagai pemimpin Turki satu satunya yang mengakui keberadaan bangsa Kurdi sebagai etnis berbeda. Disisi lain ini juga menjadi strategi politik Erdogan untuk mengambil hati etnis Kurdi (Why Erdogan needs the Kurds if he hopes to win a repeat election, 2019).

Sepanjang 2015 Turki secara serius juga memutus proyek perdamaian terhadap pihak yang telah mengancam kesatuan nasional Turki, jika PKK masih berada dalam bayang Kurdi (Kurdish peace 'impossible' - Turkey's Erdogan, 2015). Turki juga memperketat keamanan di berbagai daerah terutama di kota kota mayoritas kurdi. Operasi militer di kota Cizre dekat dengan perbatasan Suriah, Irak dan Turki menjadi salah satu yang terkenal pada kala itu. Militer memberlakukan jam malam selama 8 hari sejak mulai tanggal 4 hingga 11 September 2016. Cizre menjadi basis para militan muda pendukung PKK berkeinginan mendirikan otonomi khusus. Alhasil kota tersebut menjadi luluh lantak, sebagian gedung hancur dan selama 8 hari militer Turki mengklaim telah membunuh 40 militan PKK yang merupakan pemuda sayap PKK tersebut (40 PKK militants killed in Cizre during eight-day curfew: Governor, 2015).

Komisi HAM Uni Eropa, berkomentar serangan tersebut tidak seimbang, dan berencana untuk mengirim observer HAM karena pemerintah Turki tidak menyertakan data korban dari pihak sipil (Turkey 'must ensure access' to besieged Cizre, says Council of Europe, 2015), walau HDP telah mendata setidaknya 20 korban merupakan warga sipil non militan. Operasi dan pengamanan berhenti hingga Februari 2016, namun pada bulan tersebut justru menjadi puncak kekerasan, media *RT* mengabarkan polisi Turki membakar 150 warga sipil yang terjebak ke dalam basement sebuah gedung ('Burned to death, beheaded': Cizre Kurds accuse Erdogan's forces of civilian massacre (RT EXCLUSIVE), 2016).

Gempuran Turki terhadap PKK dan sayap militernya tak hanya dilakukan di Irak utara melainkan juga Suriah, hanya saja Turki tidak melakukan serangan secara langsung, hanya pengamanan ketat di perbatasan sebagaimana yang telah dilakukan sejak tahun 2012. Namun semenjak tahun 2015 area perbatasan menjadi wilayah baku tembak tidak hanya ditunjukan kepada tentara Suriah ataupun ISIS semata, tetapi juga militan YPG yang merupakan sayap PKK di Suriah yang secara bersamaan militan tersebut sedang gencar melakukan ekspansi wilayah di sepanjang perbatasan atas serangan-serangan yang ditunjukan kepada ISIS.

Lebih dalam, Turki melalui pembicaraan diparlemen mengambil tindakan lebih dalam dan mematangkan rencana pembuatan *buffer zone* yang telah direncanakan semenjak tahun 2012 silam dengan tujuan sebagai garis demilitersasi Suriah dan Turki yang berguna untuk mengantisipasi gerakan teror yang dilakukan SDF. Fungsi lainya zona ini juga sebagai jalur masuk dan keluar para pengungsi, yang mana Presiden Erdogan sendiri telah mengeliminasi zona

lain, mulai dari zona dilarang terbang, zona aman hingga zona dilarang berkendara yang dirasa tidak efektif untuk dilakukan. (CEBECİ & ÜSTÜN, 2012)

Walaupun begitu menurut (Iddon, 2019), rencana pembuatan garis demilitarisasi di Suriah merupakan hal yang sia-sia. Semenjak pengepungan Kobani Turki belum benar benar mengupayakan pembuatan zona demiliterisasi, pasukan Kurdi tidak pernah berupaya untuk menyeberang ke wilayah Turki walaupun kota tersebut dalam kondisi pengepungan dan pasukan kurdi terutama SDF tunduk patuh peraturan dalam perjanjian Arbil, yang di dalamnya termuat perjanjian non gerilya.

Secara keras, (Rubin, 2019) menganalisa pembentukan zona militer tersebut tidak lain adalah taktik kontraksi terhadap sekutunya agar selalu sepakat dengan perundingan dalam masalah Suriah, terutama AS yang selama ini menjadi rekanan bagi SDF, dan wilayah federasi suriah utara selama ini menjadi wilayah paling aman di Suriah.

PM Ahmad Davutoglu mengkonfirmasi pada bulan Oktober bahwa militer Turki menarget beberapa titik di kota Tel Abbyad dengan artileri jarak jauh untuk menghindari ekspansi YPG lebih jauh ke arah barat menuju sungai Eufrat. Menurut salah satu pengakuan dari militan kurdi Suriah, ini juga bukan pertama kalinya Turki mengirimkan rudal jarak jauh kepada militan kurdi Suriah (Turkey confirms shelling Kurdish fighters in Syria, 2015). Pada bulan Juli lalu Turki juga menyerang desa Zormikhar yang berada dekat dengan kota Kobani, namun Turki menyangkal bahwa serang tersebut ditargetkan ke ISIS dan hal

tersebut sudah sesuai dengan hukum internasional (Syrian Kurds accuse Turkey of attacking their forces, 2015).